PEMIKIRAN EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL HIZBUT TAHRIR

Irham Zaki

Universitas Airlangga Surabaya

irhamzaky@yahoo.com

Abstract

This study describes the thinking of Hizbut Tahrir about some of the themes of political economy. It should be studied, because they spreads the ideas of Islamic economics which aimed to political objectives; namely establishing the Caliphate in the world. With the approach of the literature, the results showed that the economic issues which were highlighted by Hizbut Tahrir revolves around the ideas related to the economy from the West, which have political motive. This can be assessed from debt relief, privatization, globalization, and free markets. Hizbut Tahrir considered that the condition of Muslims today are weak both economic and political aspects. On the other hand, Western countries propagate their ideas strongly to Muslim countries.

Keywords: Political economy, Hizbut Tahrir, debt relief, privatization, globalization, free market

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan pemikiran Hizbut Tahrir tentang beberapa tema dalam lingkup ekonomi politik.. Pemikiran gerakan ini patut dikaji, karena mereka menyebarkan pemikiran tentang ekonomi Islam yang diarahkan pada politik, yaitu cita-cita mendirikan kekhilafahan di dunia. Dengan pendekatan literatur, hasil penelitian menunjukkan bahwa isu ekonomi yang menjadi sorotan Hizbut Tahrir berkisar pada ide yang terkait dengan ekonomi yang berasal dari Barat, yang memiliki motif politik. H ini dapat dikaji dari bantuan hutang, privatisasi, globalisasi dan pasar bebas. Hizbut Tahrir memandang bahwa kondisi umat Islam saat ini adalah lemah, baik dari aspek ekonomi maupun politik. Di sisi lain, Barat gencar menjajakan idenya ke negeri muslim.

Kata Kunci: Ekonomi politik, Hizbut Tahrir, bantuan hutang, privatisasi, globalisasi, pasar bebas

Pendahuluan

Secara umum di dunia ada tiga sistem ekonomi, yaitu kapitalisme, sosialisme dan Islam. Dalam era sekarang, sistem ekonomi kapitalisme mendominasi percaturan dunia. Di sisi lain, sistem ekonomi sosialisme bisa dikatakan sudah berakhir dan hilang dari peredaran bersamaan dengan ambruknya soko guru sosialisme-komunisme, yakni Uni Soviet. Adapun sistem ekonomi Islam dalam taraf rekonstruksi menuju kejayaan masa depan.

Sistem ekonomi kapitalisme sebenarnya bukanlah sebuah sistem yang sempurna dan tidak ada titik lemahnya. Titik lemah dan rentannya sistem ekonomi kapitalisme, banyak disebutkan oleh para pakar mulai ekonom muslim sampai kalangan kapitalis sendiri, seperti Helmut Schmidt (mantan kanselir Jerman Barat) dan Henry A. Kissinger (mantan Menlu AS). Sebagaimana dikutip Chapra, Schmidt mengatakan bahwa ekonomi dunia telah memasuki suatu fase ketidakstabilan yang luar biasa dan perjalanan masa depannya benar-benar tidak pasti (Chapra, 2000: XIX).

Masalah ketimpangan ekonomi baik dalam satu negara atau antar negara sebagaimana diakui Kissinger, banyak mendapat perhatian para pakar ekonomi politik. Hal ini merupakan ketimpangan dalam sistem ekonomi internasional terutama dalam tata ekonomi dunia yang dikuasai oleh negara-negara besar industri maju. Tujuh negara industri maju: Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Kanada dan Italia, dengan tingkat populasi 14% penduduk dunia, mengkonsumsi lebih dari 40% energi, menikmati kesejahteraan barang dan jasa dunia lebih dari 50% total ekspor dunia. Hal ini amat kontras dengan kenyataan yang ada di dunia ketiga (negara berkembang dan miskin) dengan total populasi 2/3 kepadatan dunia. Kenyataannya mereka hanya menikmati kurang dari 20% tingkat kesejahteraan pemerataan kekayaan, hidup di bawah tekanan hutang luar negeri yang besar, kemiskinan struktural dan berbagai problema sosial lainnya (Ikbar, 1995:1-2).

Ketimpangan dalam sistem ekonomi internasional terutama dalam tata ekonomi dunia yang dikuasai oleh negara-negara kapitalis industri maju, juga mendapat perhatian gerakan Hizbut Tahrir Islami. Hizbut Tahrir sendiri telah mengembangkan wacana ekonomi Islam sejak dekade 1950-an, seiring dengan berdirinya gerakan tersebut pada tahun 1953. Meskipun gerakan ini lebih berorientasi pada politik, namun banyak memuat pemikiran ekonomi.

Pemikiran ekonomi Hizbut Tahrir meliputi berbagai tema-tema ekonomi mulai asas yang dipergunakan untuk membangun sistem ekonomi Islam, sampai masalah kebijakan ekonomi yang menjadi acuan negara. Pemikiran lain yang menarik adalah pemikiran ekonomi politik, terutama dalam menyikapi ide-ide yang berkaitan dengan ekonomi yang dilontarkan para pemikir ataupun negara kapitalis Barat. Pemikiran gerakan ini patut dikaji, karena di samping mereka berorientasi pada politik, yaitu cita-cita mendirikan suatu kekhilafahan di dunia, juga pembelaan mereka terhadap Islam yang dilakukan melalui media pemikiran, baik melalui buku, majalah, buletin maupun *nashrah* (selebaran).

Pandangan Hizbut Tahrir terhadap isu-isu ekonomi kontemporer

Isu-isu ekonomi kontemporer, sebagaimana kapitalisme, pada umumnya berasal dari Barat. Pandangan Hizbut Tahrir terhadap berbagai isu ekonomi kontemporer merefleksikan pemikiran ekonomi politik internasionalnya. Namun yang harus dicatat, bahwa Hizbut Tahrir memposisikan dirinya dan Islam di satu pihak. Adapun dunia Barat, baik negara seperti Amerika Serikat ataupun lembaga seperti PBB dan IMF (*International Monetary Fund*/Dana Moneter Internasional) di pihak lain.

Terkait berbagai hal yang menjadi isu utama pemikiran ekonomi Barat, Hizbut Tahrir menangkisnya dengan mengemukakan kritikan dan argumen atas rusaknya pemikiran tersebut. Beberapa isu yang menjadi bahan kritikan Hizbut Tahrir adalah sebagai berikut.

1. Bantuan Luar Negeri (Hutang)

Bantuan hutang yang selama ini diberikan kepada negara-negara berkembang dan miskin, dipandang oleh Hizbut Tahrir sebagai suatu perubahan taktik penjajahan Barat. Penjajahan di bidang ekonomi ini dilakukan melalui pinjaman-pinjaman dana. Lembaga-lembaga seperti IMF atau World Bank (Bank Dunia) hanyalah sekedar institusi yang didirikan untuk melaksanakan strategi tersebut.

Hizbut Tahrir menguraikan sejarah asal mula ide ini. Bermula pada sekitar dekade 1940-an, muncul opini bahwa metode penjajahan militer harus dihapuskan. Ketika negara-negara sekutu berhasil memenangkan Perang Dunia II, di antara program yang dilancarkan Rusia adalah: *pertama* melanjutkan kembali serangan terhadap sistem ekonomi kapitalisme; *kedua* menyerang sistem penjajahan Barat; *ketiga* menggerakkan penduduk tanah jajahan agar melakukan revolusi; dan *keempat* merekayasa berbagai kejadian untuk menggoncangkan negara-negara kapitalis Barat. Oleh karena itu, Amerika memandang bahwa tidak ada jalan lain untuk mempertahankan penjajahan kecuali dengan mengubah taktik penjajahan dan tidak ada jalan untuk mengambil wilayah jajahannya dari sisa-sisa negara terjajah kecuali dengan melakukan taktik baru penjajahan (Maliki, 1963:6).

Amerika kemudian mengadopsi taktik baru untuk mengembangkan neo-imperialisme dan mulai menerapkannya dengan mengikat negara-negara yang dimerdekan melalui berbagai hutang dan bantuan. Meski pada awalnya hal ini kelihatan samar bagi sebagian orang, sebab dibungkus dengan baju pembebasan dari cengkeraman imperialisme dan baju bantuan untuk membangun perekonomian negara. Maka peristiwa-peristiwa Kongo, Angola dan gerakan-gerakan PBB menentang Inggris di Afrika, seperti Rhodesia dan peristiwa Irian Barat di mana PBB menggabungkan Irian ke Indonesia, semua itu merupakan bukti jelas atas langkah-langkah Amerika dalam mengawali cara neo-imperialisme dengan mem-

berikan kemerdekaan kepada suatu bangsa lalu diikat dengan hutang (Maliki, 1963:6-7).

Menurut Hizbut Tahrir, jika negara yang baru merdeka menolak mengambil hutang, maka Amerika membuat berbagai kesulitan dan kegoncangan hingga negara tersebut tunduk dan dengan terpaksa mengambil hutang kepada Amerika. Dalam arti, Amerika mengikatnya dengan sarana uang seperti kasus yang terjadi pada Indonesia. Ketika Indonesia pertama kali merdeka, Indonesia menolak untuk mengambil hutang kepada Amerika, sehingga hal itu mendorong Amerika membuat berbagai bentuk pemberontakan dan kekacauan sampai Indonesia tunduk tahun 1958 dan menerima hutang dan asistensi Amerika (Maliki, 1963: 7-8).

Menurut Hizbut Tahrir, sebelum memberikan hutang, Barat membentuk opini publik tentang perencanaan dan pengembangan ekonomi di bekas negara jajahan atau bekas negara yang berada di bawah pengaruh Barat. Upaya ini membangun motivasi warga negara tersebut untuk turut menyusutkan upaya perencanaan dan pengembangan perekonomian (Ahmad, 1997:4), yakni dengan mengambil modal asing, khususnya Amerika. Melalui cara ini Amerika dapat dengan mudah memaksakan dominasi atas suatu negara dan selanjutnya mengeksploitasinya. Dengan demikian, propaganda tentang perencanaan dan pengembangan perekonomian adalah propaganda kamufase, yang maksud sebenarnya adalah membuka jalan bagi masuknya modal asing menggantikan posisi tentara dan kekuatan militer dalam memaksakan dominasi atas negeri-negeri Islam (Maliki, 1963: 8).

Dalam pandangan Hizbut Tahrir, hal di atas terkait dengan propaganda imperialisme, dan sama sekali tidak terkait dengan usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kekayaan nasional. Sebab menyusun kebijakan ekonomi dan mengembangkan kekayaan negara serta menyediakan kebutuhan-kebutuhan materi merupakan suatu perkara yang sangat mendesak dan memang perlu. Tetapi dalam menyusun kebijakan ekonomi ini tidak membutuhkan propaganda yang justru akan menguras

kekayaan negara ke luar negeri. Kebijakan itu hendaknya juga dibuat hanya berdasarkan kebutuhan-kebutuhan negeri Islam, dan tidak dibenarkan jika kebijakan itu dari pengarahannya musuh umat Islam.

Hizbut Tahrir menyebutkan bahwa setidaknya ada empat bahaya besar bantuan hutang luar negeri seperti tercantum sebagai berikut.

- a. Sebagai salah satu cara melakukan imperialisme ekonomi.
- b. Sebelum hutang diberikan, negara-negara donor memberikan syarat-syarat yang berat terhadap negara-negara penghutang untuk mengetahui kapabilitas dan kapasitas negara penghutang tersebut dengan cara mengirimkan pakar-pakar ekonominya untuk memata-matai rahasia kekuatan atau kelemahan ekonominya, dengan dalih bantuan konsultan teknis atau *review* program.
- c. Hutang luar negeri pada dasarnya merupakan senjata politik negara kapitalis yang dipimpin oleh Amerika terhadap negeri-negeri kaum muslimin untuk memaksakan kebijakan politik dan ekonominya atas kaum muslimin
- d. Hutang luar negeri amat melemahkan dan membahayakan negara penghutang, terutama hutang-hutang berjangka waktu pendek. Karena pembayaran hutang memakai dolar, maka beban pembayaran akan makin terasa berat, bukan saja karena adanya bunga hutang namun juga terpuruknya nilai mata uang negara penghutang terhadap dolar (Maliki, 1963 :200-207).

Dalam memahami hutang luar negeri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kapitalisme, maka persoalan lain yang patut dimunculkan adalah, seberapa jauh dapat dibuktikan bahwa negara penerima hutang tetap terjaga independensinya dari intervensi asing dalam transaksi pembuatan hutang tersebut. Baik ditinjau dari sudut negara-negara miskin penerima utang maupun dari sudut negara-negara kaya pemberi hutang, melebarnya kesenjangan kaya miskin di seluruh dunia adalah fenomena umum. Namun yang jauh lebih

penting daripada persoalan kesenjangan internal yang terjadi pada suatu negara, dampak yang paling parah dari kapitalisme adalah melebarnya kesenjangan negara-negara kaya dengan negara-negara miskin dan menengah di dunia.

Untuk itu tidaklah berlebihan statemen Mas'udi, yang menegaskan drama kolosal yang dimainkan Barat terkait dengan bantuan kepada suatu negara, yang mana mampu menyihir manusia untuk terkagum-kagum pada Barat, padahal bantuan yang diberikan semuanya tidak terlepas dalam rangka mencapai kepentingan negara Barat tersebut (Mas'udi, 1995: 427).

2. Privatisasi

Usaha privatisasi BUMN yang dilakukan banyak negara, ternyata juga mendapat perhatian Hizbut Tahrir, termasuk juga privatisasi yang terjadi di Indonesia. Privatisasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan perubahan kepemilikan aset dari yang awalnya milik pemerintah (dikuasai negara) menjadi milik individu. Ide privatisasi adalah sebuah pemikiran dalam ideologi kapitalisme, yang menetapkan peran negara di bidang ekonomi hanya terbatas pada pengawasan pelaku ekonomi dan penegakan hukum. Seiring dengan pencetusan ide ini pada dekade 1980-an oleh Milton Friedman (penasehat ekonomi Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan) dan Frederick High (penasehat ekonomi Perdana Menteri Inggris Margareth Thatcher), Di Amerika Serikat dan Eropa Barat banyak terjadi proses pengubahan status kepemilikan pabrik, badan usaha dan perusahaan dari kepemilikan negara menjadi kepemilikan individu. Akibatnya, aset dan perekonomian negara-negara tersebut terpusat pada segelintir individu atau perusahaan swasta tertentu (Rosadi, 2002: 34).

Sebagai salah satu program IMF, privatisasi senantiasa dibarengi dengan program lainnya, yaitu penanaman modal asing untuk investasi langsung atau tidak langsung. Dengan demikian kebijakan negara-negara berkembang untuk melepaskan sektor ekonomi publik menjadi privat sebenarnya bukan demi kepentingan rakyat, karena akan meningkatkan produk-

tivitas dan efisiensi. Kebijakan tersebut akan meningkatkan kualitas barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah. Privatisasi, pada hakekatnya adalah semata-mata strategi negara maju agar negara-negara berkembang bersikap tunduk dan pasrah pada arahan-arahan dan tekanan-tekanan lembaga-lembaga keuangan internasional, terutama IMF, yang sebenarnya adalah perpanjangan tangan dari negara-negara kapitalis imperialis (Rosadi, 2002: 35-36).

Riza Rosadi (2002: 36-37), salah satu intelektual Hizbut Tahrir Indonesia, mengemukakan bahaya-bahaya yang terjadi akibat privatisasi. Meskipun pada saat privatisasi pemerintah memperoleh keuntungan, namun privatisasi sebenarnya menimbulkan ekses-ekses berbahaya yang akhirnya menghilangkan keuntungan yang diperoleh. Bahaya atau kerugian yang paling pokok adalah:

- a. Aset-aset penting suatu negara seperti aset di sektor pertanian, industri dan perdagangan akan terkonsentrasi pada segelintir individu atau perusahaan yang memiliki modal besar dan kecanggihan manajemen, teknologi dan strategi
- b. Pemerintah menjadi lemah, sebaliknya posisi swasta menjadi kuat. Hal ini memungkinkan pihak swasta mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah, sehingga terjadi dominasi minoritas orang kaya (swasta) terhadap mayoritas rakyat kecil.
- c. Negara berkembang (Islam) akan menjadi terbuka lebar bagi masuknya investor asing, baik perorangan maupun perusahaan, yang pada gilirannya akan menyebabkan ketergantungan negeri-negeri tersebut pada pihak asing. Dengan kata lain, privatisasi menjerumuskan negeri-negeri Islam pada cengkeraman imperialisme ekonomi. Sebab, individu atau perusahaan kapitalis itulah yang nantinya akan menguasai dan mengendalikan negeri-negeri Islam. Selanjutnya akan terjadi pengurusan kekayaan negeri-negeri Islam dan sekaligus dominasi politik atas penguasa dan rakyat negeri tersebut.

- d. Pengalihan kepemilikan khususnya di sektor industri dan pertanian dari kepemilikan negara/umum menjadi kepemilikan individu umumnya akan mengakibatkan banyak PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) untuk mengurangi jumlah pegawai. Sebab investor pada sistem ekonomi kapitalisme cenderung beranggapan bahwa efisiensi akan mudah dicapai dengan teknologi padat modal dan bukan dengan teknologi padat karya.
- e. Menghapus kepemilikan umum atau kepemilikan negara artinya adalah negara melepaskan diri dari kewajiban-kewajibannya terhadap rakyat. Negara tidak akan sanggup melaksanakan banyak tanggung jawab yang seharusnya dipikul, karena negara kehilangan banyak sumber-sumber pendapatannya sehingga negara tidak akan mampu lagi secara sempurna memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyat miskin. Negara juga tak akan dapat lagi memenuhi kebutuhan rakyat dalam bidang kesehatan dan pendidikan secara layak.
- f. Negara akan kekurangan sumber pendapatannya. Karena itu negara akan disibukkan dengan upaya mencari sumber pendapatan baru untuk menggantikan sumber-sumber pendapatan yang telah dijualnya. Negara tak akan mendapatkan sumber lain yang layak, selain memaksakan pajak yang tinggi atas berbagai pabrik, sektor dan badan usaha yang telah dijualnya maupun yang memang telah dimiliki individu. Hal ini akan melambungkan harga dan tarif-tarif yang membebani masyarakat
- g. Dana yang diperoleh negara dari penjualan kepemilikan umum atau negara, umumnya tidak dikelola dalam sektor-sektor produktif. Sebagian besar dana tersebut akan habis sesuai dengan arahan dari lembaga internasional seperti IMF untuk dibelanjakan pada apa yang disebut dengan “pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, pengembangan sumber daya manusia” dan sebagainya. Semua ini jelas merupakan pintu-pintu untuk menyerap modal asing. Ini merupakan tindakan menghamburkan kekayaan umat untuk dibelanjakan bagi kepentingan investor

asing, dan menghalangi masyarakat untuk menikmati keuntungan-keuntungannya.

- h. Terjadinya perampasan hak rakyat dalam memanfaatkan aset kepemilikan umum seperti air, minyak, sarana transportasi air, dan pelabuhan-pelabuhan. Jadi, privatisasi merupakan kezaliman yang merusak penghidupan rakyat
- i. Privatisasi media massa khususnya televisi dan radio, akan memberi peluang masuknya serangan pemikiran dan budaya kapitalisme. Ini menimbulkan bahaya peradaban bagi umat, karena umat akan dicekoki pola pikir dan pola jiwa kufur, dengan standar moral dan perilaku ala Barat yang bejat dan rendah.

Dari pandangan Hizbut Tahrir terhadap privatisasi, ada beberapa hal yang patut dikaji lebih lanjut. *Pertama*, menyangkut apa yang diprivatisasi, kedua dan ketiga adalah metode dan kepada siapa privatisasi dilakukan. Untuk permasalahan pertama, yaitu menyangkut apa yang diprivatisasi, terlebih dahulu harus diperhatikan jenis kepemilikan dan kinerjanya (Assal dan Karim, 1997: 47-64). Jika kepemilikan itu adalah kepemilikan negara yang karena semata-mata negara tersebut pemilik saham atau asetnya, bukan karena fasilitas umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak, maka negara boleh melakukan privatisasi. Hal ini dengan catatan jika kinerja BUMN tersebut jauh dari efektif dan efisien, maka pemerintah bisa melakukan privatisasi.

Permasalahan kedua dan ketiga menyangkut metode dan kepada siapa privatisasi dilakukan. Dalam arti apakah privatisasi itu dilakukan dengan menjual BUMN secara lelang kepada investor asing yang memiliki kapital besar, ataukah BUMN itu berevolusi melalui pasar modal (*go public*) untuk dimiliki rakyat.

Perusahaan BUMN yang *go public*, hal ini merupakan suatu proses bertahap untuk menjadikannya semakin kukuh dan matang. Kepemilikan lambat laun akan berada di masyarakat luas dan manajemennya berada di tangan para profesional, yang mampu menjadikan perusahaan itu meraih

keuntungan besar, membayar pajak yang banyak, dan menciptakan efek perluasan kesempatan kerja. Privatisasi dengan proses evolusi yang benar seperti ini merupakan suatu keniscayaan. Privatisasi demikian tidak bisa disamakan dengan menjual BUMN secara gampang seperti yang selama ini dilakukan pemerintah Indonesia, paling tidak sejak tiga masa pemerintahan terakhir, yang sangat dipengaruhi oleh cara berpikir IMF. Jadi politik privatisasi bukan politik menjual BUMN, yang ditujukan untuk menutup defisit anggaran.

3. Globalisasi

Globalisasi menggambarkan proses interaksi yang luas dalam bidang politik, teknologi, ekonomi, sosial dan budaya. Di era sekarang isu globalisasi telah menerpa berbagai negeri di seluruh dunia. Sikap masyarakat dunia ketiga termasuk dunia Islam, yang umumnya menjadi sasaran arus globalisasi yang berasal dari Barat, ada yang menerima begitu saja dan ada yang menghadapinya dengan mengemukakan kepentingan yang tersembunyi di balik isu globalisasi. Hizbut Tahrir melihat ide globalisasi adalah untuk menutupi apa yang terkandung di dalamnya. Menurut mereka, ide globalisasi asal mulanya adalah ide globalisasi ekonomi (Zallum, 1999: 58). Untuk menyingkap apa sebenarnya globalisasi, maka Hizbut Tahrir berusaha menjelaskan fakta historis asal mula muncul dan berkembangnya ide ini.

Setelah Hizbut Tahrir memaparkan fakta historis asal mula munculnya ide globalisasi, Hizbut Tahrir juga mengemukakan ide-ide yang diajakan dengan kedok globalisasi yang dilontarkan Amerika ke luar negeri, khususnya negara-negara dunia ketiga. Menurut Zallum (1999: 71-72), hal tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Setelah hancurnya Uni Sovyet, tak ada lagi di dunia ini selain sistem ekonomi Barat yang mereka namakan "Sistem Ekonomi Pasar", untuk menggantikan namanya yang sebenarnya, yaitu "Sistem Ekonomi Kapitalis", yang patut diingat kerakusan dan reputasinya yang sangat buruk. Dikatakan bahwa seluruh negara di dunia kini telah

menerapkan sistem tersebut, atau minimal berhasrat dan berupaya untuk menerapkannya.¹

- b. Dunia modal seluruhnya telah menjadi satu, sebab para pemiliknya mampu memindahkannya ke negeri mana pun atau mampu menanamkannya di bidang investasi apa pun dengan keuntungan yang lebih besar daripada pihak lain. Dikatakan bahwa pemindahan modal ini dapat berlangsung dengan cepat karena dimudahkan oleh sarana-sarana komunikasi yang cepat, dan bahwa modal ini tak akandiinvestasikan di negeri-negeri yang membuat penghalang-penghalang untuk menghambat aliran modal.²
- c. Dunia kerja seluruhnya juga telah menjadi satu. Tetapi perusahaan-perusahaan yang mereka katakan berasal dari bermacam-macam negara, menurut Hizbut Tahrir sebenarnya tidak demikian faktanya. Karena perusahaan induknya (*holding company*) tetap berasal dari satu negara. Perusahaan-perusahaan ini berkemampuan memproduksi atau memasarkan barang dalam skala global, sehingga negeri manapun yang sedang giat membangun akan menyambut perusahaan-perusahaan itu untuk membuka lapangan kerja bagi rakyatnya, atau untuk memasarkan produk-produknya. Jika tidak mau, perusahaan itu akan berpaling menuju negara lain.³

¹Bandingkan dengan Naisbitt dan Aburdene, yang mengatakan bahwa tidak adanya keberhasilan ekonomi yang direncanakan secara terpusat akhirnya diakui Soviet. Di bawah Gorbachev, mengakui bahwa ekonomi kekuasaan mereka merupakan bencana, setidaknya sejak masa Stalin. Jelas untuk hampir semua orang bahwa model yang digerakkan oleh pasar yang terdesentralisasi dan bersifat wirausaha lebih berhasil di mana-mana. John Naisbitt dan Patricia Aburdene, *Megatrends 2000: Sepuluh Arah Baru untuk Tahun 1990-an*, ter. FX Budijanto (Jakarta: Binarupa Aksara, 1990), 83.

²Bandingkan dengan Abimanyu yang menyebutkan bahwa dimensi globalisasi di antaranya menyebabkan mobilitas modal semakin tidak memiliki bendera dan lebih berdasarkan perhitungan rasional ekonomis. Bisa dipahami jika kemudian banyak negara berkembang berlomba-lomba merebut modal asing, setidaknya bersikap manis. Abimanyu, "Liberalisasi Perdagangan," dalam *Liberalisasi Ekonomi*, ed. Loekman Soetrisno dan Faraz Umayu, 19-20.

³Naisbitt dan Aburdene mengatakan bahwa perusahaan arsitektur, rekayasa, dan konsultan di Amerika menagih miliaran dolar dalam bentuk ongkos dari seluruh penjuru dunia setiap tahun. Di Jepang pada tahun 1986, perusahaan Amerika seperti IBM, Texas Instruments, dan Coca Cola menjual barang dan jasa

d. Sarana-sarana komunikasi di seantero pelosok dunia seluruhnya telah sempurna dan saling berhubungan secara kompleks sedemikian rupa, sehingga tidak ada satu pun pihak yang dapat mendominasinya. Dikatakan bahwa saling keterkaitan ini akan menimbulkan kondisi di mana informasi yang diterima masyarakat hampir sama, bahkan berbagai pendapat dan perasaan mereka pun hampir homogen.⁴

Sarana-sarana komunikasi menurut Hizbut Tahrir, adalah beberapa ide globalisasi yang diujakan di negara-negara Dunia Ketiga. Tujuannya adalah agar negara-negara tersebut menyambut gembira kedatangan modal dan tenaga asing, mengambil rekomendasi para pemilik modal dan tenaga asing untuk mengoreksi berbagai undang-undang di negaranya, serta melakukan privatisasi BUMN agar Amerika dapat dengan mudah membelinya. Mereka mengatakan bahwa tak ada alternatif lain di luar pilihan tersebut, jika memang ingin menyusul rombongan dunia seluruhnya untuk mengglobalisasikan modal dan tenaga kerja. Sebab kalau tidak ikut, maka dia akan tetap terbelakang (Zallum, 1999:73).

4. Pasar Bebas

Tujuan dari politik pasar bebas adalah meringankan atau menghentikan intervensi negara dalam perdagangan khususnya, dan dalam kegiatan perekonomian pada umumnya. Bertolak dari sini, menurut Hizbut Tahrir, Barat, utamanya Amerika, berusaha menggiring negara-negara di dunia untuk menghilangkan hambatan tarif bea masuk dan rintangan apa pun dalam perdagangan internasional. Termasuk di dalamnya kebijakan proteksi perdagangan secara langsung –seperti larangan impor komoditi tertentu untuk memproteksi produk dalam negeri dari persaingan maupun kebijakan proteksi tidak

yang dibuat di Jepang kepada warga Jepang sebanyak USD 81 miliar. Naisbitt dan Aburdene, *Megatrends 2000*, 24.

⁴Bandingkan dengan Naisbitt dan Aburdene yang mengatakan bahwa gerakan perdagangan bebas global didorong oleh persekutuan telekomunikasi dan ekonomi yang memungkinkan berkomunikasi dalam jarak yang sangat jauh seolah-olah hanya berseberangan meja saja. *Ibid.*,13.

langsung, seperti penetapan tarif yang tinggi untuk sebagian barang impor, pemberian subsidi untuk sebagian produk dalam negeri, dan penetapan kuota untuk mencegah pertukaran perdagangan (Zallum, 1999: 52-53).

Menurut Hizbut Tahrir, tujuan Amerika memaksakan politik pasar bebas atas negara-negara di dunia, adalah mengubah keadaan dunia menjadi “pasar bebas”, membuka pasar negara-negara di dunia bagi penanaman modal asing, dan mengeliminir peran negara-negara di dunia untuk mengatur perekonomian, dengan melakukan privatisasi sektor publik. Tujuan terakhir ini khususnya diarahkan kepada negara-negara dengan sektor publik yang menempati proporsi tinggi dalam kegiatan perekonomian mereka. Artinya, keberadaan sektor publik ini telah dianggap menghalangi kemunculan peran dan pertumbuhan pemilikan individu (Zallum, 1999: 53).

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan itu, menurut Hizbut Tahrir, Amerika dan negara-negara kapitalis besar telah mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan internasional dan membentuk blok-blok ekonomi seperti NAFTA yang beranggotakan AS, Kanada dan Meksiko, Pasar Bersama Eropa, dan APEC yang beranggotakan negara-negara NAFTA, Australia, Selandia Baru, Jepang, Indonesia dan negara-negara macam Asia, yang berada di sekitar Lautan Pasifik. Selain itu, AS juga telah menjadikan ketujuh negara industri kaya (G-7 pada waktu itu, pen.) sebagai instrumen untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi, keuangan, dan perdagangan internasional, serta untuk menjamin dan mengontrol pelaksanaan semua kebijakan ini. Ini semua merupakan langkah persiapan yang ditempuh AS untuk melegitimasi semua kebijakan tersebut menjadi undang-undang internasional, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan di sektor perdagangan (Zallum, 1999: 53-54).

Menurut Hizbut Tahrir, Amerika juga memanfaatkan WTO (*World Trade Organisation*) untuk mewujudkan tujuannya. Sebelum WTO berdiri, GATT menjadi rujukan bagi perdagaa-

ngan internasional hingga menjelang diadakannya WTO. Hampir semua negara di dunia terikat dengan GATT, baik negara-negara yang menanda-tanganinya maupun tidak. Namun karena GATT hanya mengatur hubungan perdagangan antar negara, dan tidak memberi otoritas kepada Amerika untuk mengatur kebijakan ekonomi dan perdagangan dalam negeri yang diambil oleh negara-negara di dunia, Amerika pun merasa bahwa GATT tidak memadai lagi untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Maka Amerika kemudian mengambil langkah baru untuk menggantikannya dengan WTO, yang kelahirannya diumumkan di Maroko tahun 1994. Tak lama kemudian, mayoritas negara di dunia pun ramai-ramai menandatangani perjanjian baru tersebut dan bergabung dengan organisasi baru ini. Tentunya, ini adalah hasil berbagai tekanan yang dilancarkan oleh Amerika terhadap negara-negara di dunia untuk mewujudkan tujuannya (Zallum, 1999: 54).

Dikatakan oleh Hizbut Tahrir bahwa aspek terpenting dari perjanjian baru ini adalah adanya otoritas yang diberikan kepada negara-negara kapitalis kaya dan berpengaruh dengan Amerika sebagai tokohnya untuk mengintervensi urusan ekonomi dan perdagangan negara-negara yang terikat dengan perjanjian itu secara umum, melalui peraturan yang dirancang oleh negara-negara berpengaruh tadi. Maka bukan rahasia lagi, bahwa tujuan utama Amerika dan negara-negara kapitalis dalam strategi pasar bebas ini adalah membuka pasar seluruh negara-negara di dunia bagi produk-produk unggulan dan investasi-investasi mereka.

Dengan begitu, negara-negara yang disebut sebagai negara berkembang akan senantiasa berada di bawah hegemoni Amerika dalam bidang ekonomi dan perdagangan, serta tidak berpeluang membangun ekonominya sendiri di atas basis-basis yang kuat dan kokoh. Padahal kondisi demikian ini akan bisa membebaskan ketergantungan ekonomi negara-negara berkembang tadi dari negara-negara kaya, sehingga nantinya negara-negara berkembang itu tidak lagi menjadi pasar bagi barang-

barang konsumtif yang diproduksi negara-negara kaya. Jadi, apabila negara-negara berkembang itu tetap berada di bawah hegemoni negara-negara kaya, maka mereka tak akan pernah mampu mengubah kondisi ekonomi mereka menjadi produktif, yang harus bertumpu pada industri berat sebagai prasyarat mutlak bagi kondisi perekonomian yang produktif itu.

Untuk itu Hizbut Tahrir menyimpulkan dan berpendapat bahwa umat Islam wajib menolak politik pasar bebas karena strategi ini bertentangan dengan Islam, baik ditinjau dari segi pandangan dasar yang melahirkannya dan asas-asas pijakannya, maupun dari segi kemudaratannya yang akan terjadi akibat adanya keterikatan umat Islam dengan strategi ini. Tindakan mengikat perekonomian negeri-negeri muslim dengan perekonomian negara-negara kapitalis yang melaju dengan cepat, adalah tindakan gegabah yang sangat berbahaya. Sebab hal ini akan menghalangi pembangunan ekonomi dunia Islam di atas basis-basis yang kokoh, dan di samping itu akan memberikan kesempatan luas kepada kaum kafir untuk mempertahankan cengkeramannya atas kaum muslimin dan negeri-negeri mereka (Zallum, 1999: 58).

Urgensitas Ekonomi Politik Menurut Hizbut Tahrir

Harta, sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, menjadi perhatian banyak kalangan, tidak saja para ahli ekonomi, namun juga ahli fiqh. Aspek harta ini sangat penting, bahkan dalam usul fiqh ia termasuk salah satu dari lima aspek yang dilindungi, yang dikenal dengan *umur daruriyah linnas* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Zuhayli, 1986: 1020). Ini sejalan dengan tujuan shari'ah yaitu hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan, rahmat, kebahagiaan dan kebijaksanaan. Apapun yang dapat mengubah keadilan menjadi penindasan, rahmat menjadi kesulitan, kesejahteraan menjadi kesengsaraan dan hikmah menjadi kebodohan, tidaklah berhubungan dengan shari'ah (Jauziyah, 1993: 11).

Demikian juga dengan Hizbut Tahrir, di mana mereka juga mengakui bahwa harta merupakan sesuatu yang erat kaitan-

nya dengan kehidupan manusia. Lebih dari itu, mereka mengatakan adanya ikatan yang erat antara ekonomi dengan politik. Perekonomian merupakan salah satu faktor yang menopang secara bersama suatu negara seperti halnya kekokohan pemikiran ideologi dan kekuatan militer. Sehingga tidak ada nilainya kekuatan militer suatu negara tanpa kekokohan pemikirannya, dan tidak ada nilainya kekuatan militer tanpa kekuatan ekonominya.

Hizbut Tahrir merasa prihatin ketika melihat kondisi umat Islam dewasa ini. Menurut Hizbut Tahrir bahwa sekarang ini kondisi umat Islam adalah lemah, baik dari segi politik maupun ekonomi dalam percaturan global. Hizbut Tahrir mengatakan bahwa masalah paling berat yang telah memalingkan umat Islam dan penyakit paling parah yang diderita umat Islam dalam kehidupan mereka adalah masalah pemikiran yang menyangkut persoalan pemerintahan dan ekonomi. Kelemahan umat Islam ini dikatakan oleh Hizbut Tahrir memerlukan aktifitas pemikiran umat. Aktifitas pemikiran ini mencakup sejarah umat masa lalu, sekarang dan akan datang. Demikian juga sejarah umat dan bangsa lain dan bagaimana mereka meraih kebangkitannya (Hizbut Tahrir, 1979: 1).

Dikatakan bahwa keadaan umat Islam pada permulaan abad 20 mengalami kegoncangan dahsyat, yang telah mencaibik-cabik eksistensi mereka, memecah belah kesatuan negeri-negerinya serta menghancurkan negaranya, yaitu negara khilafah. Islam telah dijauhkan dari realitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pecahan negara khilafah dalam negara bangsa kecil-kecil, diperparah oleh kondisi bahwa masing-masing negara yang terpecah ini pada awalnya secara langsung tunduk pada pemerintahan negara-negara kafir, baru kemudian tunduk pada pemerintahan bonekanya yang berasal dari kaum muslimin juga. Hal ini ditambah diberlakukannya perundang-undangan kufur dan direalisasikannya secara nyata di seluruh negeri Islam. Lebih lanjut dikatakan bahwa kegoncangan ini diperparah oleh bersekongkolnya negara-

negara kafir dengan antek-anteknya dari kalangan penguasa negeri Arab, untuk merampas Palestina dan menggantinya dengan negara Israel.

Menurut Hizbut Tahrir, dengan hancurnya sosialisme, Amerika sebagai pimpinan kapitalisme mendominasi per-caturan politik internasional. Dengan adanya dominasi tunggal Amerika, lahirlah Tata Dunia Baru. Sebelumnya Amerika menyebarkan kapitalisme sejak dia tampil di panggung dunia sebagai negara penjajah. Metode yang digunakannya untuk menyebarkan kapitalisme adalah dengan melakukan pen-jajahan, baik penjajahan gaya lama ataupun gaya baru (Zallum, 1999: 4). Penjajahan gaya baru ini didasarkan pada hegemoni tak langsung dalam bidang ekonomi, politik dan budaya (Goldsmith, 1996: 160). Secara riil, penjajahan gaya baru ini terwujud dalam bentuk berbagai macam perjanjian, pakta militer, kesepakatan hidup berdampingan secara damai, bantuan ekonomi dan keuangan serta kesepakatan kebudayaan (Zallum, 1999: 5-6).

Ideologi kapitalisme dipandang sebagai ideologi yang membahayakan aqidah Islam, karena menurut Hizbut Tahrir, ideologi kapitalisme berdiri di atas landasan pemisahan agama dari kehidupan (*fasl din 'an al-hayah*). Berdasarkan asas ini, menurut Hizbut Tahrir, bahwa manusia adalah peletak tata aturan dalam kehidupannya. Untuk itu harus dijaga kebebasan manusia yakni kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan dan kebebasan individu dalam bertingkah laku.

Menurut Hizbut Tahrir, yang patut diperhatikan adalah setelah Amerika berhasil memantapkan dominasi ideologi kapitalisme secara internasional, kini Amerika tengah berusaha memantapkan dominasi ideologi itu secara universal (Zallum, 1999: 4). Dikatakan bahwa Amerika dengan dibantu negara kapitalis lain, sebelumnya telah sukses menjadikan kapitalisme sebagai asas interaksi dan konvensi internasional. Kini Amerika bercita-cita menjadikan kapitalisme sebagai “agama” bagi seluruh bangsa dan umat manusia. Cara yang

ditempuhnya adalah dengan mengajak seluruh umat manusia untuk meyakini aqidah kapitalisme dan menjadikan ide-ide kapitalisme sebagai persepsi-persepsi, standar-standar, dan keyakinan-keyakinan yang berlaku di segala aspek kehidupan umat manusia. Hal ini ditandai dengan lahirnya PBB, di mana Amerika menjadikan konvensi kapitalisme sebagai landasan utama bagi Piagam PBB (Zallum, 1999: 5). Di satu sisi, PBB kini menjadi alat utama untuk mengokohkan hegemoni Amerika, sementara di sisi lain PBB berfungsi untuk menanamkan kepercayaan akan konvensi-konvensi kapitalisme sebagai undang-undang internasional yang bersifat mengikat (Zallum, 1999: 7).

Menurut Hizbut Tahrir, serangan Amerika secara universal untuk menjadikan kapitalisme sebagai ideologi seluruh umat manusia, tidak menghadapi perlawanan apa pun, kecuali di dunia Islam. Menurut Hizbut Tahrir, ideologi Islam sebenarnya tetap eksis secara universal, setelah negara Khilafah 'Uthmaniyah runtuh pada tahun 1924. Hal ini karena umat Islam dengan keanekaragaman bangsanya tetap menganut ideologi Islam, sekalipun ideologi ini telah dijauhkan dari kehidupan praktis dan tidak lagi mempunyai eksistensi internasional.

Hizbut Tahrir merasa berkewajiban untuk menjelaskan hakekat isu-isu yang datang dari Barat beserta bahayanya bagi umat Islam, agar umat menyadarinya dan dapat mengambil sikap yang *shar'i* terhadapnya. Menurut Hizbut Tahrir, perjuangan mengembalikan Islam ke dalam realitas kehidupan sebagai ideologi universal dan sistem politik yang akan diemban negara khilafah kepada seluruh umat manusia-dipandang merupakan suatu perkara yang diyakini adanya secara pasti. Pemikiran dari Barat ini menurut Hizbut Tahrir harus dipandang bukan hanya sebagai sesuatu yang harus ditolak, atau hanya sebagai ulah Barat yang kafir, namun juga untuk menghantam Islam. Untuk itu berbagai pemikiran yang datang dari Barat harus dibongkar secara tuntas, agar umat

Islam menyadari apa yang diinginkan musuh Islam tersebut serta menyadari tipu daya terhadap agama Islam.

Menurut Hizbut Tahrir, pemikiran-pemikiran dari Barat ini adalah yang paling banyak diterima dan disambut dengan penuh kebanggaan oleh umat Islam. Di samping pemikiran-pemikiran ini yang paling banyak direkayasa oleh Barat agar bisa diterapkan secara praktis, bahkan dikatakan bahwa Barat senantiasa mengawasi upaya penerapannya dengan gigih dan terus-menerus. Dikatakan bahwa jika umat Islam dipimpin dengan mempergunakan sistem demokrasi secara *de jure*, dan ini merupakan usaha negara imperialis Barat supaya penjajahan serta sistem mereka tetap bisa dipertahankan-, maka umat Islam secara *de facto* dipimpin dengan mempergunakan sistem ekonomi kapitalisme pada semua sektor kehidupan perekonomiannya.

Oleh karena itu, Hizbut Tahrir melihat bahwa pemikiran-pemikiran Islam tentang ekonomi inilah yang sebenarnya merupakan pemikiran yang paling kuat pengaruhnya dalam kehidupan perekonomian di dunia Islam. Hizbut Tahrir berargumen bahwa pemikiran inilah yang akan merubah umat secara revolusioner serta pemikiran inilah yang paling banyak dilawan oleh negara imperialis Barat dan kaki tangannya beserta para pengagum Barat. Dari sini Hizbut Tahrir memandang perlu untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ekonomi dalam sistem kapitalisme, yang dipergunakan oleh Barat sebagai pemikiran paling mendasar dalam membangun ekonomi politik (*iqtisad siyasi*).

Untuk itu ketika Hizbut Tahrir menganalisis suatu isu ekonomi yang dihembuskan oleh Barat, mereka memandangnya tidak hanya dari sudut ekonomi semata, namun melihat hal itu terkait sebagai upaya politis negara Barat untuk mengukuhkan hegemoninya atas umat Islam. Hal ini merupakan tahapan strategi Hizbut Tahrir dalam berinteraksi dengan masyarakat dengan merobohkan dan memotong pemikiran (الصراع الفكري) yang batil seperti aqidah, pemikiran dan aturan-aturan kufur, juga terhadap ideologi, pemahaman

dan pemikiran yang salah dengan membuka kedok kepalsuan serta kontradiksinya dengan Islam (Hizbut Tahrir, 1979: 41).

Lebih lanjut tahapan strategi Hizbut Tahrir dalam berinteraksi dengan masyarakat adalah dengan perjuangan politik (الكفاح السياسي) seperti melawan negara-negara penjajah baik dalam ekonomi, politik, militer maupun budaya serta mengungkap strategi-strateginya, dan membongkar persekongkolannya. Hal ini untuk membebaskan umat dari genggamannya (Hizbut Tahrir, 1979: 41-42).

Dikatakan bahwa kaum muslim saat ini berada dalam lingkungan masyarakat yang menganut berbagai pemikiran yang bertentangan dengan pemikiran Islam. Bahaya yang mengancam kaum muslimin ini dapat berupa bahaya eksternal yang mencakup pemikiran yang berasal dari peradaban Barat, pemikiran sosialisme dan komunisme dan berbagai pemikiran yang membahayakan aqidah Islam dan shari'ah. Semua ini dikatakan muncul sebagai akibat dari serangan pemikiran (*ghazw fikri*) yang dilontarkan Barat kepada kaum muslim. Serangan Barat yang keji adalah serangan melalui para penguasa mereka dan lembaga-lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia dan PBB. Jalur-jalur ekonomi, politik, budaya, sosial dan pertahanan praktis mereka kuasai.

Umat Islam harus waspada terhadap penyebaran ideologi sekularisme oleh Barat. Di bidang ekonomi mereka menyebarkan kapitalisme yang eksploitatif, di bidang politik menyebarkan pertentangan, di bidang budaya menyebarkan budaya permisif yang berintikan amoralisme. Lembaga-lembaga dunia seperti PBB, IMF dan World Bank dibentuk semata-mata untuk melancarkan semua tujuan-tujuan ideologisnya. Penindasan dan eksploitasi seakan menjadi tindakan sah setelah dilegalkan oleh badan-badan dunia bentukan negara Barat tersebut. Sementara melalui khilafah, menurut Hizbut Tahrir Islam akan menyebarkan tauhid yang berintikan pembebasan manusia dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan kepada Allah. Melalui shari'ah yang harus dilaksanakan sebagai konsekwensi tauhid, akan

tercipta tatanan ekonomi yang adil, budaya yang luhur, pendidikan yang meneguhkan visi dan misi penciptaan manusia, dan hubungan antar negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip aqidah Islam.

Menurut Hizbut Tahrir, lenyapnya institusi politik umat Islam berupa khilafah membawa dampak global yang dihadapi umat, berupa kian tidak berdayanya umat menghadapi berbagai penghinaan dan penganiayaan yang dilakukan Barat. Lebih jauh dikatakan bahwa lenyapnya khilafah juga melebarkan jalan para imperialis Barat untuk menghisap berbagai kekayaan alam milik umat Islam. Sejak era penjajahan militer, Barat telah melakukan eksploitasi atas sumber daya alam yang dimiliki umat Islam. Dulu, pemerintah kolonial Belanda melalui VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*), telah menjarah rempah-rempah dari Indonesia. Sekarang, penghisapan kekayaan alam juga tetap terjadi, yang bahkan para penguasa muslim justru bersekutu dengan kaum imperialis tersebut. Di bidang pertambangan misalnya, PT Freeport Indonesia Coy (FIC) yang anak perusahaan Freeport McMoran Copper & Gold asal Amerika Serikat, pemilik miliaran ton batu galian yang mengandung emas, perak dan tembaga di Irian Jaya. Perusahaan ini juga dikatakan memanipulasi, menilap royalti yang seharusnya menjadi hak Indonesia. Di samping itu, FIC juga tidak pernah mengakui hak-hak masyarakat setempat, yang berakibat banyak keresahan bahkan pengaduan, meskipun selalu kandas berhadapan dengan kekuatan kontrak karya yang disinyalir sarat KKN itu. Selain Freeport, ada Newmont Minahasa Raya (NMR) yang 80 persen sahamnya dikuasai Newmont Mining Corporation dari Denver, AS. Perusahaan ini juga turut mengurus sumber daya alam negeri ini secara besar-besaran. Minyak bumi juga menjadi sasaran “penjarahan” para kapitalis Barat melalui tangan perusahaan swasta mereka.

Dari realitas ini Hizbut Tahrir melihat bahwa telah nyata makar musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Mereka tidak saja menghinakan kaum muslimin, namun juga berkehendak

membangkrutkan negeri-negeri umat Islam sehingga tidak tersisa kekayaan alamnya bagi anak cucu, kecuali sedikit. Untuk itu solusinya adalah mengembalikan kejayaan umat dengan kembali pada shari'at-Nya, menerapkannya, dan menegakkan *dawlah khilafah*, yang akan melindungi dan menyelamatkan umat Islam dari berbagai makar musuh-musuhnya.

Penutup

Isu-isu ekonomi yang menjadi sorotan Hizbut Tahrir berkisar pada ide-ide yang terkait dengan ekonomi yang berasal dari Barat, mulai bantuan hutang, privatisasi, globalisasi dan pasar bebas. Bantuan hutang dikatakan sebagai upaya Barat untuk melakukan neo-imperialisme. Privatisasi yang gencar didengungkan adalah taktik Barat untuk mengambil alih perusahaan dalam negeri di negara berkembang, terutama negeri Islam. Globalisasi ekonomi dipandang Hizbut Tahrir pada hakekatnya adalah untuk memudahkan ekspansi perusahaan besar dari Barat di negeri muslim. Pasar bebas adalah strategi untuk menghilangkan berbagai hambatan termasuk tarif, agar produk dari negara kapitalis kaya dapat leluasa masuk dan dijual secara mudah di pasar dalam negeri.

Hizbut Tahrir memandang bahwa kondisi umat Islam adalah lemah baik dari aspek ekonomi maupun politik, di sisi lain Barat gencar menjajakan ide-idenya di negeri Islam. Untuk itu agar umat Islam dapat tetap berpegang teguh pada ajaran agamanya, Hizbut Tahrir berusaha menjelaskan hakekat berbagai isu tersebut beserta kelemahan, bahaya, dan tipu daya yang ada, sekaligus bagaimana harus menyikapinya.

Daftar Rujukan

- Ahmad, Khurshid. 1997. "Pembangunan Ekonomi;" dalam *Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*. Terj. Ainur R. Sophiaan. Surabaya: Risalah Gusti.
- Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Terj. Imam Saefuddin. Bandung: Pustaka Setia.
- Chapra, M. Umer. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia.

- Eickelman, Dale dan James Piscatori. 1996. *Muslim Politics*. Princeton: Princeton University Press.
- Hizbut Tahrir. 1979. *Mafahim Hizbut Tahrir*. Quds: Hizbut Tahrir.
- Ikbar, Yanuar. 1995. *Ekonomi Politik Internasional*. Bandung: Angkasa.
- Khan, Muhammad Akram. 1994. *An Introduction to Islamic Economics*. Islamabad: International Institute of Islamic Thought dan Institute of Policy Studies.
- Maliki, 'Abd Rahman. 1963. *Siyasah Iqtisadiyah Muthla*. Quds: Hizbut Tahrir.
- Mas'udi, Masdar F. 1995. "Zakat: Konsep Harta yang Bersih," dalam Budhy Munawar Rachman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina.
- Nabhan, Faruq. 1984. *Ittijah Jama'i fi Tashri' Iqtisad Islami*. Beirut: Muassasat Risalah.
- Naisbitt, John dan Patricia Aburdene. 1990. *Megatrends 2000: Sepuluh Arah Baru untuk Tahun 1990-an*, ter. FX Budijanto. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Rawwas, Muhammad Qal'ah Ji, 1997. *Mabahith fi Iqtisad Islami*. Beirut: Dar Nafa'is.
- Rosadi, Muhammmad Riza. 2002. "Menolak Privatisasi," *Wa'ie*, 20.
- Yakan, Fathi. 1993. *Globalisasi, Telaah dan Peran Islam terhadap Tatanan Dunia Baru*. Terj. Mufti Labib. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Zallum, Abdul Qadim. 1999. *Persepsi-Persepsi Berbahaya Untuk Menghantam Islam dan Mengokohkan Peradaban Barat*. Terj. Muhammad Shiddiq Al Jawi. Jakarta: Pustaka Thariqul 'Izzah.
- Zuhayli, Wahbah. 1989. *Fiqh Islami wa Adillatuh* Juz 8. Damaskus: Darul Fikr.